



**PENETAPAN**

Nomor 743/Pdt.P/2020/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

**KESIH Binti SARTA**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jl Semanggi I RT. 001 RW. 003, Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagai "**Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Desember 2020 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register Nomor 743/Pdt.P/2020/PA.Tgrs, tanggal 29 Desember 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Disampaikan dengan hormat, Pemohon mengajukan permohonan dispensasi untuk menikah dengan anak Pemohon dengan alasan/dalil "â€" dalil sebagai berikut :

Bahwa Pemohon telah menikah secara syariat agama islam dengan seorang laki "â€" laki **INING CEMBENG Bin H. BAIT** dan memiliki anak Perempuan bernama **DISTA EMELIA** berstatus Perawan, umur 18 tahun, Lahir Tangerang, 22 September 2002, bertempat tinggal di Jl

"Halaman 1 dari 18 halaman Penetapan Nomor 743/Pdt.P/2020/PA.Tgrs"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semanggi I RT. 001 RW. 003, Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten ;

Bahwa anak Pemohon tersebut sejak kurang lebih 1 tahun telah menjalin hubungan kekasih dengan seorang Laki-laki, berstatus Perjaka, bernama **Mohamad Sibyani**, umur 30 tahun, Lahir 09 Oktober 1990, agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Salamun RT. 011 RW. 003, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur ;

Bahwa anak pemohon dengan kekasihnya tersebut telah saling mengetahui kepribadian masing-masing sehingga terjalin hubungan kasih sayang yang saling mencintai satu sama lain sebagai pasangan kekasih yang sudah sulit untuk dipisahkan;

Bahwa antara anak pemohon dengan kekasihnya tersebut tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan dan semenda yang dapat menghalangi perkawinan menurut ketentuan syariat agama Islam maupun peraturan perundang-undangan, oleh sebab itu anak pemohon dan kekasihnya tersebut sangatlah patut untuk diikat dalam pernikahan yang resmi;

Bahwa setelah anak Pemohon dengan calon Istri anak Pemohon mempunyai tekad yang sama, lalu keduanya mengurus segala kelengkapan persyaratan pernikahan untuk disampaikan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan tidak diterima dengan alasan belum mencapai batas minimal dibolehkannya kawin menurut Undang-Undang dan disarankan untuk mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Tigaraksa sesuai dengan surat Yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;

*"Halaman 2 dari 18 halaman Penetapan Nomor 743/Pdt.P/2020/PA.Tgrs"*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun anak Pemohon saat ini belum mencapai batas minimal umur yang diperbolehkan untuk melakukan pernikahan, namun ia telah siap untuk menjadi seorang Istri telah siap untuk menjadi seorang Istri yang baik dan taat kepada calon suaminya, begitu pula sebagai calon Suami yang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan lahir dan batin;

Bahwa mengingat anak Pemohon saat ini sudah berhubungan akrab dan tidak dapat dipisahkan lagi dengan calon Istrinya, maka untuk menghindari sesuatu hal yang tidak diinginkan, Pemohon tanpa menunggu sampai umur diperbolehkannya menikah harus segera dilaksanakannya pernikahan tersebut pada 10 Januari 2021 ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Dispensasi Nikah kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa dengan harapan agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Memberikan dispensasi Nikah kepada (**DISTA EMELIA**) untuk menikah dengan seorang Laki - laki (**BOBY DARMAWAN**) ;

Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku;

*"Halaman 3 dari 18 halaman Penetapan Nomor 743/Pdt.P/2020/PA.Tgrs"*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian permohonan Dispensasi Nikah ini Pemohon ajukan, atas penetapan yang akan dijatuhkannya nanti, Pemohon menyampaikan terima kasih.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan, bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya, namun ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan ..... Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten karena anak Pemohon belum mencapai batas umur perkawinan;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon bernama :  
....., umur ..... tahun, agama Islam, pekerjaan .....  
tempat tinggal di Jl Semanggi I RT. 001 RW. 003, Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa benar ia sedang menjalin hubungan dengan seorang pria bernama .....
- Bahwa ia dengan ..... berhubungan selayaknya pasangan remaja yang sedang berpacaran seperti umumnya;
- bahwa ia dengan ..... bermaksud untuk menikahinya, namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan ....., Kabupaten Tangerang menolaknya dengan alasan usianya belum memenuhi batas waktu umur pernikahan;
- Bahwa ia menyatakan akan berusaha untuk menjadi isteri dan ibu rumah tangga yang bertanggung jawab;
- bahwa ia akan menikahi ..... karena kehendak sendiri bukan karena ada paksaan ;
- bahwa antara dirinya dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, atau sesusuan ;

*"Halaman 4 dari 18 halaman Penetapan Nomor 743/Pdt.P/2020/PA.Tgrs"*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menghadirkan pula calon suami anak Pemohon bernama ....., umur ..... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., tempat tinggal di ....., dan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa benar ia sedang menjalin hubungan dengan anak Pemohon yang bernama ..... selama lebih kurang .....
- bahwa ia dan ..... berhubungan selayaknya pasangan remaja yang sedang berpacaran seperti umumnya;
- bahwa ia dan calon isteri bermaksud untuk melangsungkan pernikahan namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan ..... menolaknya dengan alasan usia calon isteri belum memenuhi batas waktu umur pernikahan ;
- Bahwa ia sudah bekerja sebagai ..... dengan penghasilan Rp. ...., (.....),-/- setiap bulannya;
- bahwa antara dirinya dengan calon isterinya tidak ada hubungan nasab, atau sesusuan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti :

A. Surat :

1. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan atas nama Dista Amelia dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Timur KotaTangerang Selatan, nomor B-0183/KUA.28.08.06/PW.01/XII/2020, tanggal 16 Desember 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dari Pemerintah Kota Tangerang Tangerang, nomor 3674054506730001, bukti surat tersebut telah diberi meterai

"Halaman 5 dari 18 halaman Penetapan Nomor 743/Pdt.P/2020/PA.Tgrs"



cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama INING CEMBENG dari Pemerintah Kota Tangerang Selatan, nomor 3674052909530001, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama INING CEMBENG dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Tangerang Selatan, nomor 3674051602100136, tanggal 16 Agustus 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama DISTA EMELIA dari Pemerintah Kota Tangerang Selatan, nomor 3674056209020001, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama DISTA EMELIA dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Tangerang Selatan, nomor 3674-LT-06022014-0048, tanggal 10 Februari 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama DISTA EMELIA, dari KLINIK MAKMUR JAYA, tanggal 16 Desember 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

B. Saksi :

1. sepupu

*"Halaman 6 dari 18 halaman Penetapan Nomor 743/Pdt.P/2020/PA.Tgrs"*





Akbar bin Usman, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jl Semanggi II RT. 002 RW. 003, Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten; di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama INING CEMBENG Bin H. BAIT;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 18 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama MOHAMADSIBYANI;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah berumur 30 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah saling mengetahuikpribadian masing-masing sehingga terjalin hubungan kasih saking yang salingmencintai satu sama lain sebagai pasangan kekasih yang sudah sulit untukdipisahkan;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;

*"Halaman 7 dari 18 halaman Penetapan Nomor 743/Pdt.P/2020/PA.Tgrs"*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak, anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah mempunyai penghasilan dengan bekerja sebagai karyawan PLN dengan penghasilan sebesar Rp. ...., setiap bulannya;
- Bahwa sudah cukup.

## 2. sepupu

Dodi Utama bin Makmun, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jl Semanggi I RT. 001 RW. 003, Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama INING CEMBENG Bin H. BAIT;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 18 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama MOHAMADSIBYANI;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah berumur 30 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;

*"Halaman 8 dari 18 halaman Penetapan Nomor 743/Pdt.P/2020/PA.Tgrs"*





- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah saling mengetahuikpribadian masing-masing sehingga terjalin hubungan kasih saksing yang salingmencintai satu sama lain sebagai pasangan kekasih yang sudah sulit untukdipisahkan;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak, anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah mempunyai penghasilan dengan bekerja sebagai karyawan PLN dengan penghasilan sebesar Rp. ...., setiap bulannya;
- Bahwa sudah cukup.

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima, kemudian Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan, lalu menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap sebagaimana dalam permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

*"Halaman 9 dari 18 halaman Penetapan Nomor 743/Pdt.P/2020/PA.Tgrs"*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah dengan dalil-dalil dan atau alasan-alasan sebagai berikut :

1. Anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ..... dengan surat keterangan terlampir ;
2. Pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah akrab dan telah berpacaran sejak kurang lebih ..... (.....) tahun yang lalu, hubungan mereka telah sedemikian eratny;
3. Bahwa oleh sebab itu Pemohon berpendapat lebih baik hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya ditingkatkan dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum agar tidak melakukan perbuatan maksiat berkepanjangan;
4. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, Pemohon berstatus perawan dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang untuk singkatnya dianggap sebagai telah dikutip dalam pertimbangan ini

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon mengenai dispensasi pernikahan dengan segala aspek dan akibatnya ;

Menimbang bahwa alasan pokok yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak kandungnya bernama ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., tempat tinggal di Jl Semanggi I RT. 001 RW. 003, Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, namun ditolak oleh Kantor

*"Halaman 10 dari 18 halaman Penetapan Nomor 743/Pdt.P/2020/PA.Tgrs"*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama tersebut, sebagaimana surat Penolakan Pernikahan, Nomor Surat Penolakan Pernikahan, Nomor ....., tanggal ....., yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ....., karena belum berumur 19 tahun sebagai syarat untuk menikah, sedangkan Pemohon telah berniat dan telah disepakati untuk menikahkan anak Pemohon dengan seorang laki-laki bernama ....., umur ..... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., tempat tinggal di ....., dan juga saat ini antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan/pacaran selama .....

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa dalam Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sedangkan dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) maka dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan, sehingga dispensasi nikah mengandung maksud untuk menyimpangi ketentuan mengenai batas minimal umur dalam melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melakukan pernikahan tersebut belum memenuhi syarat umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Majelis Hakim meneliti apakah ada hajat dan alasan permohonan yang diajukan benar-benar mendesak, Kantor Urusan Agama serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum melalui bukti-bukti yang sah ;

Menimbang bahwa sebelum memeriksa bukti-bukti, Majelis Hakim telah lebih dahulu mendengarkan keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon yang isinya telah diuraikan dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohannya telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.

*"Halaman 11 dari 18 halaman Penetapan Nomor 743/Pdt.P/2020/PA.Tgrs"*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

....., yang keseluruhannya adalah fotokopi, menurut Majelis Hakim berdasarkan 1888 KUH Perdata jo Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, tentang Bea Meterai alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil suatu alat bukti dan sudah patut dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama ..... dan .....

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, terdiri dari dua orang saksi dewasa, memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan diperiksa seorang demi seorang, oleh karenanya berdasarkan Pasal 144 HIR secara formil dapat di dengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan dipersidangan, telah saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan antara keterangan saksi satu dengan lainnya, antara keterangan saksi-saksi dengan pokok-pokok dalil posita, didasarkan atas fakta atau peristiwa yang dilihat dan di dengarnya sendiri dan bukan atas dasar kesimpulan atau pendapatnya, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 171 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut secara meteril memiliki nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam positanya telah mendalilkan bahwa permohonannya untuk menikahkan anaknya yang bernama ..... dengan calon suaminya bernama ..... telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ..... maka berdasarkan bukti P.1, Majelis Hakim menilai bahwa alasan Pemohon tersebut dapat dibuktikan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 dan P.3 terbukti bahwa Pemohon dan anak Pemohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, dan Pemohon merupakan merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan berdasarkan bukti P.3 dan P.4, terbukti bahwa ..... adalah anak kandung Pemohon ;

*"Halaman 12 dari 18 halaman Penetapan Nomor 743/Pdt.P/2020/PA.Tgrs"*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, serta bukti-bukti, baik bukti surat maupun saksi, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama ....., umur ... tahun (belum mencapai usia 19 tahun) dengan calon suaminya yang bernama .....
- bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran selama ..... sudah saling mencintai;
- bahwa Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon sudah mendaftarkan pernikahannya tetapi oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan ....., namun ditolak dengan alasan anak Pemohon belum mencapai usia .... tahun ;
- bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan yang menghalangi pernikahan ;
- bahwa orang tua dari calon suaminya anak Pemohon tidak keberatan untuk menikahkan anaknya dengan anak Pemohon ;
- bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah siap untuk menikah, dan orang tua kedua belah pihak siap membantu dan membimbing keduanya;

Menimbang bahwa terhadap fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, karenanya harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum, yang salah satunya adalah syarat umur calon suami itu harus mencapai usia minimal 19 tahun (vide Pasal Pasal 7 ayat (1) undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan) ;

Menimbang bahwa anak Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal, karena masih berusia 19 tahun, yang menurut undang

*"Halaman 13 dari 18 halaman Penetapan Nomor 743/Pdt.P/2020/PA.Tgrs"*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang harus memperoleh dispensasi dari Pengadilan ternyata memungkinkan diberikan dispensasi sepanjang ketentuan agama tidak menentukan lain (vide Pasal 6 ayat (6) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) ;

Menimbang, bahwa tujuan pembatasan usia secara umum dalam undang-undang adalah, sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka 2, yang menyatakan "Batas umur ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental";

Menimbang, bahwa selain tujuan tersebut pembatasan umur, juga bertujuan untuk menjamin hak-hak anak, agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor; 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa majelis menyadari, memberikan dispensasi pada anak yang masih di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan, akan berakibat negatif, karena hak-hak anak yang semestinya terlindungi untuk berkembang secara optimal, untuk bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri, demi terwujudnya anak yang berkualitas akan terhambat. Akan tetapi di sisi lain anak kandung Pemohon yang sudah lulus **SLTA** serta telah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya, yang sudah sedemikian eratnya, dan jika dibiarkan akan mengakibatkan perbuatan yang negatif yakni terjerumus dalam perzinahan;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat, tidak ditentukannya batas umur pernikahan dalam syari'at Islam, bukan suatu kealpaan dalam hukum Islam, melainkan karena pernikahan bagi manusia dipandang sebagai kebutuhan biologis setiap makhluk hidup, yang

"Halaman 14 dari 18 halaman Penetapan Nomor 743/Pdt.P/2020/PA.Tgrs"





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semata-mata tidak didasarkan atas kematangan dan kecerdasan berfikir, melainkan merupakan dorongan biologis, yang antara satu dengan yang lainnya berbeda, dan hal tersebut hanya dapat dilihat tanda-tanda alamiah bagi anak, dengan tidak menafikan tujuan perkawinan yang sakral dan mulia;

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon dari segi umur masih di bawah ketentuan undang-undang untuk dinyatakan dewasa, akan tetapi berdasarkan fakta yang ditemukan, anak Pemohon dalam pergaulan keseharian telah tampak dewasa, dan mandiri serta mampu bertanggungjawab, terbukti telah dapat memenuhi kebutuhan hidup;

Menimbang, bahwa didasarkan pada permohonan Pemohon, yang diperkuat dengan pengakuan anak Pemohon serta keterangan calon suaminya, menyatakan bahwa anak kandung Pemohon dan calon suaminya telah berpacaran selama ..... dan diantara mereka sudah sulit untuk dipisahkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebagai sandaran pertimbangan mengutip firman Allah SWT dalam surat An- Nuur ayat 32, yaitu :

وَانكحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَانِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa pertimbangan hokum tersebut juga telah sesuai dengan maksud dari kaidah fiqhiyyah/doktrin pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang terdapat dalam Kitab *Al-Asybah Wa Al-Nazhoir*, halaman 62 yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح. إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

"Halaman 15 dari 18 halaman Penetapan Nomor 743/Pdt.P/2020/PA.Tgrs"



*Artinya : “Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). “Apabila saling berlawanan antara mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya”;*

Menimbang, bahwa didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas maka untuk menghindarkan mudharat yang berkepanjangan dan sebagai bentuk tanggung jawab Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya demi kepentingan masa depan baik itu anak Pemohon sendiri, dan calon suaminya serta anak mereka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon mempunyai alasan yang kuat sehingga permohonan Pemohon untuk dapat diberikan dispensasi pernikahan anak kandungnya patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di depan sidang sepanjang tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim, maka harus dinyatakan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91 A ayat (3) dan ayat (5), maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala peraturan serta perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ..... untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama .....;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.271.000,00, ;

*“Halaman 16 dari 18 halaman Penetapan Nomor 743/Pdt.P/2020/PA.Tgrs”*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awwal 1442, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Drs. Rahmat, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Akhmadi, M.Sy, dan Drs. H. SHOBIRIN, S.H., M.H. sebagai Hakim-hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota serta dibantu oleh Muhammad Affan Gofar, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

**Drs. Rahmat, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Akhmadi, M.Sy**  
**H. SHOBIRIN, S.H., M.H**

**Drs.**

Panitera Pengganti,

**Muhammad Affan Gofar, S.H., M.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00,
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 75.000,00,
3. Biaya Panggilan : Rp. 150.000,00,

*"Halaman 17 dari 18 halaman Penetapan Nomor 743/Pdt.P/2020/PA.Tgrs"*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP panggilan : Rp.,00  
4. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00,  
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,00,  
Jumlah : Rp. 271.000,00,  
(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

"Halaman 18 dari 18 halaman Penetapan Nomor 743/Pdt.P/2020/PA.Tgrs"

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)